

Lampiran I : Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung serta masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Forum SKPD dan Musrenbang dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

RKPD memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan fokus kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ

tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2007.

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musrenbang Tahun 2010.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sebagai dasar perumusan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Tahun 2011, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2011.

Tujuan ditetapkan RPKD Tahun 2011 adalah untuk menciptakan sinkronisasi, sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah baik antar wilayah dan antar urusan pembangunan, maupun antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah berdasarkan kesepakatan penetapan prioritas program/kegiatan pembangunan Tahun 2011 sesuai kaidah dan ketersediaan dana yang ada.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010
- 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012
- 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.4.1. Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah
 - 3.4.2. Dana Desentralisasi/APBD
 - 3.4.3. Dana Tugas Pembantuan/APBN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

a. Bidang Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Klungkung yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klungkung berkontribusi pada semakin membaiknya daya saing daerah di tingkat provinsi dan nasional.

Kependudukan

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga berencana sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui program Keluarga Berencana, penambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindarkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Catatan Sipil terkait dengan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah : ***Peningkatan pembinaan dan pemantapan kependudukan serta catatan sipil***. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Bab II mengenai urusan pemerintahan, pada pasal 2 ayat (4) huruf "J", urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil terdiri dari :

- Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pelayanan akta catatan sipil ;
- Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
- Perencanaan Kependudukan dan perkembangan kependudukan ;
- Menyelenggarakan ketersediaan stok blanko dan formulir yang berkaitan dengan administrasi kependudukan (KK dan KTP).

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2009 antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas tertib administrasi kependudukan.
- 2) Meningkatkan pengendalian pertumbuhan dan pemerataan jumlah penduduk.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2009 adalah : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan beberapa indikator kinerja serta target capaian yaitu :

- a. Terbangun dan teroperasikannya SIAK secara terpadu
- b. Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
- c. Terbentuk dan tertatanya sistem koneksi (inter phase tahap awal)
- d. Terolah serta tersusunnya laporan informasi kependudukan
- e. Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Pertambahan penduduk semakin tahun kian meningkat, sedangkan lapangan kerja malahan berkurang. Dampaknya terjadi dimana-mana, bahkan dengan terjadinya krisis global memberikan dampak keseluruh dunia. Keterampilan yang dimiliki tidak memberikan arti yang begitu besar, tamatan pendidikan dari SLTA sampai PT kian bertambah banyak, tapi lapangan kerja semakin sulit, belum seimbang antara yang tamatan pendidikan dalam arti punya skill

dengan tersedianya lapangan kerja. Pemerintah sampai saat ini terus berupaya menciptakan lapangan kerja bersama-sama dunia usaha.

Kabupaten Klungkung dengan jumlah penduduk 176.822 jiwa (86.849 jiwa laki-laki dan 89.973 jiwa perempuan) memiliki tingkat pengangguran terbuka yang cukup besar yaitu sekitar 7.165 orang (4%) dan angka partisipasi angkatan kerja sebesar 104.814 orang (data Dinsosnakertrans Juni 2009 dan BPS 2008). Pengangguran terbuka dimaksud adalah orang yang tidak bekerja sama sekali (never worked) dan orang yang pernah bekerja tapi sekarang tidak bekerja (ever worked but now jobless). Kemungkinan hal ini semakin tahun akan bertambah, karena tamatan sekolah bertambah terus.

Kesehatan

Status kesehatan dan gizi masyarakat terus ditingkatkan melalui perluasan akses penduduk terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sementara itu, jumlah, kualitas, dan penyebaran sumberdaya manusia kesehatan telah ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah kepulauan (Nusa Penida). Upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan serta pengawasan obat dan makanan juga telah dilaksanakan. Namun, pengawasan obat dan makanan masih belum berjalan secara optimal, terkait dengan keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana pemeriksaan obat dan makanan.

Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan ketersediaan, pemerataan mutu sarana pelayanan kesehatan dasar terutama Puskesmas dan jaringannya. Dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi. Khusus mengenai Rabies yang saat ini menjadi isu regional dan nasional memerlukan penanganan, pencegahan, dan pengendalian yang lebih serius karena dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian sosial, ekonomi, dan nyawa manusia. Upaya pencegahan dan penanganannya perlu ditingkatkan secara terintegrasi dari segi tata laksana kesehatan hewan dan manusia.

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial perlu terus diupayakan peningkatannya berupa penyediaa obat-obat generik esensial sehingga diharapkan dapat terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Pengawasan terhadap obat, makanan, keamanan pangan, dan narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari obat-obatan yang tidak bermutu, bahan pangan berbahaya, dan penyalahgunaan NAPZA.

Pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keserasian kehidupan beragama merupakan faktor penunjang yang utama dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan sehat tetap terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan pengetahuan kesehatan dan upaya preventif, penyembuhan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

Tujuan penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang ingin dicapai adalah:

- Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat yang didukung oleh lingkungan yang sehat.
- Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dengan dukungan partisipasi masyarakat dan pengembangan manajemen kesehatan modern.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

- Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) serta angka kesakitan (morbidity) dan kematian (mortality) akibat penyakit menular tertentu.
- Meningkatnya prosentase tatanan rumah tangga sehat dan tatanan tempat-tempat umum sehat.
- Meningkatnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan pemerintah.
- Tersedianya tenaga, sarana dan peralatan yang sesuai standar pada setiap jenjang pelayanan.

Pencapaian tujuan dan sasaran didukung dengan pencapaian indikator kinerja sasaran :

Sasaran 1 : Menurunnya AKB, AKI serta Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran ini adalah dengan melaksanakan Program Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia dan Pencegahan Penyakit Menular.

a. Upaya peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia melalui :

- *Upaya pelayanan dan program kesehatan ibu maternal* : difokuskan pada peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan terkait dengan berbagai faktor risiko yang menjadi penyebab utama kematian maternal. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui puskesmas dan puskesmas pembantu dengan penempatan tenaga bidan desa di pelosok desa.
- *Pelayanan antenatal (K1 dan K4)* : Cakupan pencapaian ANC pada tahun 2009 yaitu kunjungan baru Bumil (K1) sebesar 97,4% dengan capaian kinerja sebesar 97,4% dari target 100%, sedangkan cakupan pencapaian K4 sebesar 92,5% dengan capaian kinerja sebesar 97,4% dari target 95%. Pencapaian kinerja K4 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 99,2%. Walaupun mudahnya aksesibilitas masyarakat khususnya ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu namun faktor pengetahuan dan mobilitas penduduk belum dapatantisipasi secara maksimal disamping masyarakat mencari pelayanan kesehatan di praktek swasta yang belum melaporkan secara optimal.
- *Pertolongan persalinan oleh Tenaga kesehatan profesional* : Akses pencarian pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional di Kabupaten Klungkung pada tahun 2009 sebesar 92,5% dari target program sebesar 90% dan mengalami peningkatan dari tahun 2008 (90,9%). Cakupan pencapaian kinerja pertolongan persalinan sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 102,7%. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi aspek pembinaan dan promosi kesehatan serta mudahnya akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Walaupun demikian masih terjadi Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun atau anggota keluarga terutama pada beberapa wilayah di Kecamatan Nusa Penida (Puskesmas Nusa Penida III dan Puskesmas Nuda Penida I bagian atas).
- *Neonatus resti / komplikasi yang ditangani*. Cakupan neonatal resti ditangani oleh petugas kesehatan pada tahun 2009 sebesar 68,2% dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 85,5% dari target 80%. Pencapaian kinerja pada tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 125,0%. Kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) pada tahun 2009 sudah semua (100%) dapat ditangani dengan capaian kinerja 100% dari target 100%. Tingkat pencapaian kinerja penanganan kasus BBLR di kabupaten klungkung pada tahun 2009 meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 56,7%.
- *Kunjungan neonatus (KN1 dan KN2)*. Bayi berumur hingga kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling besar. Kunjungan neonatus (K2) pada tahun 2009 sebesar 96,7% dari target 90%, sedikit lebih tinggi dari cakupan tahun 2008 sebesar 94,0%. Tingkat pencapaian kinerja

kunjungan neonatus sudah baik karena capaian kinerja sebesar 107,4% meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 104,4%.

- *Angka kematian Bayi (AKB)*. Angka kematian bayi pada tahun 2009 sebesar 8,96 per 1000 kelahiran hidup. Kejadian ini menunjukkan telah terjadi peningkatan pencapaian kinerja dibandingkan tahun 2008 dengan AKB sebesar 10,6 per 1.000 kelahiran hidup. Cakupan pencapaian AKB lebih kecil dari target indikator AKB rata-rata Propinsi Bali sebesar 30 per 1.000 kelahiran hidup. Kecendrungan penurunan AKB dapat dipengaruhi oleh pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu berikut fasilitasnya. Pengetahuan dan pendapatan masyarakat yang meningkat juga berperan melalui perbaikan gizi yang pada gilirannya mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap penyakit.
- *Angka Kematian Ibu (AKI)*. Kasus kematian Ibu maternal di Kabupaten Klungkung cenderung berfluktuasi dari tiga tahun terakhir. Cakupan AKI di Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Kejadian AKI pada tahun 2006 sebesar 142/100.000 LH, mengalami penurunan menjadi 106,0 per 100.000 LH tahun 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 103,4 per 100.000 kelahiran hidup dari target sebesar 120 per 100.000 LH. Terjadi peningkatan pencapaian kinerja kejadian AKI pada tahun 2009 sebesar 114,2% dibandingkan dengan pencapaian kinerja AKI tahun 2008 sebesar 83,4% menunjukkan belum optimalnya kinerja program disamping faktor lain seperti pengetahuan masyarakat, sosial ekonomi dan lingkungan.
- *Pelayanan kesehatan usila*. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pra dan usila hanya baru mencakup pelayanan kesehatan terhadap usila (umur 60 tahun) dan pelayanan untuk pra usila. Cakupan pelayanan usila dan pra usila pada tahun 2009 sebesar 58,9% menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 100% dari target 70%. Tingkat pencapaian kinerja hanya 84,2% .

b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program pencegahan dan pengendalian penyakit bertujuan untuk mencegah (menurunkan angka kesakitan dan kematian) dan meminimalkan terjadinya transmisi penyakit menular dan mengurangi dampak sosial sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Program pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi 2 kegiatan yaitu:

Pencegahan penyakit menular : Pelaksanaan surveilans epidemiologi, Pelaksanaan sero survey. Pelaksanaan imunisasi. Cakupan realisasi 100%.

- Pengendalian penyakit menular, meliputi :
 - *Pengendalian penyakit Demam berdarah Dengue (DBD)* : Semua (100%) kasus DBD telah ditangani seluruhnya dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 125%. Beberapa faktor yang berkontribusi besar terhadap menurunnya kasus DBD adalah pencapaian kinerja angka bebas jentik nyamuk (ABJ) pada tahun 2009 sebesar 97,6%.
 - *Pengendalian penyakit malaria*. Semua kasus malaria sudah mendapat penanganan pengobatan (100%) dengan angka kematian (CFR) karena malaria sebesar 0%. Tingkat pencapaian kinerja pengobatan malaria pada tahun 2009 sama dengan tahun 2008 sebesar 100% .
 - *Pengendalian penyakit kusta*. Upaya pelayanan terhadap penderita kusta antara lain melakukan penemuan penderita melalui survei kontak, dan pemeriksaan intensif penderita yang datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan atau kontak penderita. Angka prevalensi penderita kusta tahun 2009 sebesar <1 per 10.000 penduduk menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 1,13 per 10.000 penduduk dengan angka penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) mencapai 90%. Angka penderita kusta yang selesai berobat (RFT

rate) tahun 2009 mencapai 90 % meningkat dibandingkan tahun 2008 hanya 30%. Dengan demikian capaian kinerja RFT rate penderita kusta sebesar 100% dari target 90%.

- *Pengendalian penyakit Tuberkulosis.* Jumlah kasus TB paru positif dari kasus gejala klinis yang ditemukan mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 72,8% menjadi 101,0% pada tahun 2009. Penderita TB paru positif semuanya (100%) sudah mendapatkan paket pengobatan TB dengan strategi DOTS. Angka kesembuhan penderita TB paru tahun 2009 sebesar 96,4% dengan pencapaian kinerja sebesar 113,4% meningkat dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2008 hanya sebesar 34,5%.
- *Pengendalian penyakit ISPA dan Diare.* Pengendalian penyakit ISPA lebih difokuskan pada penanganan dini dan tatalaksana kasus secara cepat dan tepat terhadap penderita pneumonia balita yang ditemukan. Angka kesakitan pneumonia pada anak balita pada tahun 2009 sebanyak 1.744 kasus meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 877 kasus. Pencapaian kinerja penanganan penderita pneumonia pada anak balita sudah mencapai 100%.
- *Penanggulangan dan pengobatan penderita diare* tahun 2009 di 9 puskesmas ditemukan sebanyak 7218 penderita meningkat dari tahun 2008 sebanyak 6.817 kasus yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klungkung. Dengan meningkatnya mutu penatalaksanaan penderita diare oleh petugas sehingga dalam tiga tahun terakhir mortality rate penyakit diare pada balita sebesar 0%.

Berdasarkan realisasi indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pencapaian sasaran 1, menurunkan angka kesakitan, angka kematian akibat penyakit, AKI dan AKB rata-ratanya sebesar **100,4%** meningkat dari tahun 2008 sebesar **93,3%** % dari target yang ditetapkan

Sasaran 2 : Meningkatnya Tatanan Rumah Tangga Sehat & Tatanan Tempat-Tempat Umum sehat. Hasil pelaksanaan program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM)

- Promosi kesehatan.

Cakupan wilayah promosi kesehatan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pelayanan dasar kesehatan telah dapat direalisasikan sampai di 59 desa/kelurahan. Kegiatan pembinaan peran serta masyarakat (PSM) lebih mengarah pada menumbuhkan kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk membudayakan perilaku sehat melalui kegiatan promosi kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan pada tahun 2009 sebanyak 16.829 kali meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 9.420 kali..

- Pengembangan desa siaga. Target pembentukan desa siaga kesehatan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 59 desa/kelurahan dengan capaian kinerja tahun 2009 sebesar 100%.
- Peranserta masyarakat dalam kegiatan posyandu sudah cukup baik, ini tercermin dari 287 posyandu yang aktif melakukan kegiatan dengan sistem 5 meja. Pada tahun 2009 sebanyak 60% posyandu katagori purnama dari target 40% dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 150%. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 dimana posyandu yang strata purnama sebesar 70,03% dan katagori sehingga capaian kinerja pada tahun 2008 sebesar 175,08%.
- Cakupan pencapaian rumah tangga sehat dengan mengacu pada standar PHBS mengalami peningkatan dari sebesar 55,6% pada tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2009 dari target 65%. Pencapaian kinerja cakupan rumah tangga sehat (PHBS) sebesar 123,1%.

- Cakupan ASI Eksklusif (pemberian ASI selama 6 bulan tanpa makan tambahan) belum menunjukkan hasil yang signifikan. Cakupan ASI eksklusif dalam 4 tahun terakhir masih dibawah target sebesar 80% yaitu 50,7% pada tahun 2009 meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar 36%. Cakupan ASI eksklusif pada tahun 2009 sebesar 50,7% sehingga pencapaian kinerja hanya 63,4%.
- b. Penyehatan dan Pengawasan kualitas Lingkungan dan Kualitas Air
- Cakupan pemakaian air bersih di wilayah perkotaan dan pedesaan rata-rata pada tahun 2009 sebesar 98,2% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar 98,0% dari yang ditargetkan sebesar 90%. Tingkat pencapaian kinerja sebesar 109,1%
 - cakupan pemakaian jamban keluarga juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Cakupan jamban keluarga pada tahun 2009 sebesar 82% sedangkan tahun 2008 hanya sebesar 80,0% dari target 75%. Capaian tingkat kinerja pembinaan jamban keluarga pada tahun 2009 sebesar 109,7%
 - Kondisi rumah sehat, mengalami penurunan dari 86,5% pada tahun 2008 menjadi 85% tahun 2009 dari yang ditargetkan sebesar 74%. Tingkat pencapaian kinerja cakupan rumah sehat pada tahun 2009 sebesar 114,9 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 116,9%.
 - Tempat-tempat Umum (TTU) yang diawasi dan sudah memenuhi syarat kesehatan sebanyak 70% pada tahun 2009 namun menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2008 dengan capaian 71,9%. Tingkat pencapaian kinerja sebesar 87,5%..

Berdasarkan realisasi indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pencapaian sasaran meningkatkan tatanan rumah tangga sehat dan tempat-tempat umum sehat rata-ratanya sebesar **96,3** % mengalami penurunn dibandingkan tahun 2008 sebesar **99,15%**, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam form PPS terlampir.

Sasaran 3 : Meningkatnya Tatanan Rumah Tangga Sehat & Tatanan Tempat-Tempat Umum sehat. Hasil pelaksanaan program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut

- Dalam memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kab Klungkung memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar bersubsidi dilaksanakan di 9 Puskesmas dan 53 Puskesmas Pembantu yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kec. Nusa Penida, Klungkung, Banjarangkan dan Kecamatan Dawan.
- Kegiatan bina pelayanan medik dasar tercermin dari tingkat pemanfaatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu oleh masyarakat dalam mencari pelayanan kesehatan. Kunjungan penduduk (Coverage) rawat jalan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu tahun 2009 sebesar 56,9% terjadi penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 87,5% dari target SPM sebesar 15%. Pencapaian kinerja kunjungan rawat jalan pada tahun 2009 mencapai 379,4%. Sedangkan kunjungan rawat inap di Rumah sakit dan Puskesmas rawat inap pada tahun 2009 sebesar 1,3% dari dengan target SPM sebesar 1,5% demikian capaian kinerja kunjungan rawat inap hanya mencapai 84%.
- Pemantauan pertumbuhan balita.
Kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat hasil pemantauan pertumbuhan balita dilakukan melalui pengukuran berat badan balita menurut umur (BB/U). Dari segi kualitas pemantauan pertumbuhan balita dan pelayanan kesehatan gizi balita menunjukkan penurunan dimana balita dengan BB naik sebesar 73,2% (2009) dibandingkan tahun 2008 sebesar 79,6% dari target 80%. Tingkat pencapaian kinerja sebesar 81,4%.
- Gizi buruk. Semua (100%) kasus gizi buruk sudah di intervensi dengan pemberian paket PMT penyuluhan dan PMT pemulihan. Kejadian gizi buruk menyebar di 4 kecamatan Kabupaten dimana faktor penyebabnya antara lain karena berat bayi lahir rendah (BBLR),

kelainan bawaan atau adanya penyakit penyerta, pola asuh yang kurang memenuhi syarat dan sebagian dari keluarga miskin (Gakin).

- Upaya perbaikan gizi. Upaya perbaikan gizi dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pemantauan ditemukan beberapa permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat seperti : kekurangan vitamin A dan anemia. Cakupan vitamin A (2x per tahun) yang diberikan pada bulan february dan Agustus 2009 sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 99,6%, sehingga capaian kinerja sebesar 111,33%. Cakupan pemberian tablet besi (Fe3) pada ibu hamil pada tahun 2009 sebesar 92% mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2008 sebesar 95%, dari target sebesar 90%. Tingkat pencapaian kinerja sebesar 102,8%.
- Pelayanan JPKM. Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan pada tahun 2009 sebesar 43,6% dari 31.084 masyarakat miskin dan yang memanfaatkan pelayanan rawat inap sebesar 0,29%. Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat dengan program Gakin (JKMM) pada tahun 2009 dengan pencapaian kinerja sebesar 43,6% dari target 100%. Kejadian ini akibat dari penduduk keluarga miskin yang mencari pelayanan kesehatan lupa membawa/menunjukkan kartu Gakin sehingga dimasukkan kedalam program pelayanan kesehatan dasar bersubsidi.

Berdasarkan realisasi indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan pemerintah rata-ratanya sebesar **101,0%** mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar **123,9%**

Sasaran 4 Tersedianya Tenaga, Sarana & Peralatan Sesuai Standar pelayanan.

- a. Tenaga Kesehatan. Pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM pada setiap jenjang pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2009 baru terealisasi sebanyak 428 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan dan puskesmas. Tenaga yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung sebesar 11,2% dan di puskesmas sebesar 88,8%, yang mana kalau dilihat dari profesi tenaga sebanyak 19,6% bukan profesi bidang kesehatan dan sebesar 80,4% adalah profesi kesehatan.
- b. Sarana dan prasarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu), rumah sakit (umum dan khusus), sarana kesehatan bersumber masyarakat (UKBM). Pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan sampai dengan tahun 2009 secara umum telah dapat dipenuhi sesuai kebutuhan. Jumlah dan kondisi fasilitas sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Klungkung dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan. Sarana kesehatan (Puskemas & Pustu) sudah tersebar di semua desa di Kabupaten Klungkung dengan jumlah sarana sebanyak 62 sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari 3 unit puskesmas perawatan, 6 unit puskesmas non perawatan dan 53 unit puskesmas pembantu. Jumlah puskesmas di Kabupaten Klungkung sebanyak 9 buah, dengan rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2009 sebesar 5,13 per 100.000 penduduk. Bila melihat wilayah kerja puskesmas, rasio puskesmas sudah memenuhi konsep wilayah kerja puskesmas karena rata-rata satu unit puskesmas di Kabupaten Klungkung melayani 19.492 penduduk.
 - Rumah sakit. Sarana rumah sakit umum (pemerintah dan swasta) di Kabupaten Klungkung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah rumah sakit umum sebanyak 3 buah, terdiri dari RSUD pemerintah 1 buah dan RSUD swasta sebanyak 2 buah.
 - Kendaraan roda empat (mobil) untuk kegiatan puskesmas keliling (pusling) yang dimiliki pada tahun 2009 sebanyak 27 unit dan yang masih layak digunakan

sebanyak 20 unit (74,1%). Kendaraan roda 4 (empat) terdistribusikan di Dinas Kesehatan dan Pusat perbekalan kesehatan (Gudang Farmasi) sebanyak 9 unit dan di Puskesmas sebanyak 18 unit. Rasio puskesmas keliling terhadap puskesmas pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 yang hanya sebesar 2,3. Kondisi kendaraan roda 4 (empat) pada tahun 2009 sebesar 74,1% lebih baik dari tahun 2008 sebesar 65 %.

- Penambahan alat-alat laboratorium di Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan sediaan sebanyak 9 paket, dan untuk pemeriksaan kualitas air sebanyak 1 paket telah dapat direalisasikan dan sampai saat ini seluruhnya (100%) dalam kondisi baik.
 - Perumahan dinas untuk dokter sudah sediakan oleh Kabupaten Klungkung sebanyak 18 unit terdiri atas rumah dinas dokter umum (15 unit) dan dokter gigi (3 unit) atau telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Semua (100%) perumahan dokter yang layak huni pada tahun 2009 meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2008 sebanyak 16 unit (88,8%).
 - Perumahan dinas untuk Paramedis, pada tahun 2009 sudah tersedia sebanyak 68 unit berkurang dari tahun 2008 sebanyak 70 unit. Berkurangnya perumahan paramedis karena 2 (dua) unit digunakan untuk tempat pelayanan kesehatan (perkantoran). Kondisi perumahan paramedis pada tahun 2009 sebanyak 100% sudah layak huni lebih baik dibandingkan tahun 2008 yang layak huni hanya 39 unit (52,11%).
 - Sarana pelayanan kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti posyandu, poskesdes dan desa siaga. Jumlah UKBM di Kabupaten Klungkung sebanyak 287 posyandu, 59 desa siaga dan 15 poskesdes. Rasio posyandu terhadap desa/kelurahan adalah 4,8 atau rata-rata pada setiap desa/kelurahan terdapat 5 posyandu. Rasio desa siaga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2009 sebesar 1 yang berarti setiap desa/kelurahan sudah menjadi desa siaga.
- c. Penyediaan Informasi kesehatan dan Penyusunan perencanaan program. Kegiatan yang dilaksanakan pada informasi kesehatan seperti validasi data kesehatan, menyusun profil dan laporan tahunan kesehatan, evaluasi kegiatan (laporan kinerja), LAKIP, pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK online), membuat kajian/analisis masalah kesehatan (AMK). Dimana informasi kesehatan yang berdasarkan pada data base menjadi aspek yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan dan anggaran kesehatan yang berbasis kinerja.
- d. Sertifikasi, Akreditasi dan Perijinan
- Kegiatan penyuluhan makanan/minuman dan perijinan sudah melaksanakan kegiatan seperti melakukan sosialisasi/penyuluhan makanan, minuman dan perijinan terhadap 35 industri rumah tangga, sedangkan pembinaan dan pengawasan produksi makanan/minuman dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setahun (100%).
 - Dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan pelatihan dan penyegaran tenaga medis dan paramedis tentang penatalaksanaan penyakit sebanyak 150 orang dan pelatihan SIK sebanyak 75 orang.

Kesejahteraan Sosial

Seiring dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, tantangan ke depan akan semakin berat dan permasalahan sosial yang dihadapi semakin kompleks. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain, besarnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), luasnya cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkaitan dengan penduduk miskin dan rentan, terutama anak, lanjut usia dan penyandang cacat terlantar.

Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anak balita, atau anak usia sekolah setingkat SD-SMP, atau ibu hamil diberikan akses terhadap pelayanan publik baik untuk komponen kesehatan maupun pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan perlindungan sosial adalah bagi anak telantar, lanjut usia yang tergolong dalam kelompok penduduk miskin dan rentan, dan penyandang cacat telantar. Untuk itu diperlukan suatu upaya pembangunan dan pembenahan sistem perlindungan sosial yang layak dan meningkatkan cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, serta penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat daerah, regional dan nasional.

Dilihat dari atmosfer geografis, Kabupaten Klungkung memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten lain di Bali, disebabkan sebagian besar wilayahnya berada di seberang lautan yang merupakan wilayah kepulauan. Adanya pulau-pulau kecil dengan geografis berbukit dan musim panas yang cukup panjang menjadikan masyarakat Klungkung secara umum dikatakan berpenghasilan rendah (low economic), disamping jumlah penduduk yang cukup padat. Kondisi ini yang memicu terjadinya ketimpangan disegala aspek baik aspek ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, disamping faktor-faktor lain seperti krisis multidimensi (multidemantion crisis), bencana alam (disasters of earth), dll. Dunia IT begitu mengglobal dimana-mana, bahkan sampai ketinggian desa sudah membur (IT mixs), tapi permasalahan sosial (social comonity problem) tidak bisa tuntas bahkan cenderung fluktuatif (fluctuate trend).

Permasalahan sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi, baik terjadi secara alami, struktural maupun budaya. Ada 2 (dua) katagori permasalahan sosial yang secara general ada di masyarakat yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Masalah Sosial (PSKS). PMKS ada 22 jenis yaitu Anak Balita Terlantar (ABT), Anak Terlantar (AT), Anak Nakal (AN), Anak Jalanan (AJ), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Korban Tindak Kekerasan (KTK), Lanjut Usia Terlantar (LUT), Penyandang Cacat (PENCA), Tuna Susila (TS), Pengemis (PNG), Gelandangan (GLD), Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), Korban Penyalahgunaan Napza (NAPZA), Keluarga Fakir Miskin (KFM), Keluarga Tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP), Komunitas Adat Terpencil (KAT), Korban Bencana Alam (KBA), Korban Bencana Sosial (KBS), Pekerja Migran Terlantar (PMT), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan Keluarga Rentan (KENTAN). Permasalahan lain adalah apa yang disebut dengan PSKS merupakan orang-orang atau organisasi yang peduli dengan masalah sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna (KT), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Dunia Usaha yang melakukan UKS, serta Keperintisan dan Kepahlawanan. Masalah kesejahteraan sosial konvensional mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan bencana alam, sedangkan masalah kesejahteraan sosial kontemporer berupa masalah-masalah yang sudah ada maupun masalah baru yang apabila tidak segera ditangani maka akan menimbulkan dampak yang cukup besar, seperti pengungsi, korban napza, ODHA, dll.

Kabupaten Klungkung dengan 4 (empat) Kecamatan yang sebgayaan besar masyarakatnya adalah bertani, memiliki permasalahan sosial (PMKS) sebanyak 14.265 PMKS (sumber data Dinsostektrans Kab. Klungkung, Juni 2009). Data dari Dinas Sosial Prop. Bali per Januari 2009 menunjukkan bahwa PMKS yang ada terdiri dari Anak Balita Terlantar (ABT) sebanyak 271 orang, Anak Terlantar (AT) 427 orang, Anak Nakal (AN) 45 orang, Anak Jalanan (AJ) 40 orang, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 974 orang, Lanjut Usia Terlantar (LUT) 1.379 orang, Penyandang Cacat (PENCA) 1.135 orang, Keluarga Fakir Miskin (KFM) 7.988 RTS, Keluarga Tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 900 KK, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) 109 KK, dan katagori PSKS yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 195 orang, Organisasi Sosial (Orsos) 6 orang, Karang Taruna (KT) 59 orang, dan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat sebanyak 101 orang.

Berbicara RTM/RTS yang masuk pada salah satu katagori PMKS yaitu KFM sebanyak 7.988 RTS atau 27.382 ARTM/ARTS (15,61%) artinya sudah di atas 15% dari jumlah penduduk

yang ada, belum termasuk masalah-masalah sosial lainnya. Jadi masalah sosial yang ada di Kabupaten Klungkung cukup besar dan hal ini merupakan beban bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk mengentaskannya.

Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa yang telah ditegaskan sejak awal oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Penegasan tersebut tercantum dalam salah satu tujuan bernegara di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu landasan untuk memperkuat pembangunan daerah dan nasional serta menjadi salah satu instrumen untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, memperkokoh nilai-nilai budaya, dan meningkatkan daya saing.

Persentase penduduk yang melek huruf serta rata-rata lama sekolah merupakan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang secara internasional digunakan untuk membandingkan kualitas sumber daya manusia antar negara. Sesuai dengan tujuan ke-2 Millenium Development Goals (MDGs) yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua yang menargetkan bahwa pada tahun 2015 semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klungkung tahun 2009 dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf, pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk serta angka putus sekolah.

Indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pencapaian sasaran pendidikan adalah:

- (1) Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan SD/SMP/SMA
- (2) Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD/SMP/SMA
- (3) Tingkat penyelesaian sekolah
- (4) Angka Putus Sekolah (APS)
- (5) Tingkat Kelulusan SD/SMP/SMA

Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan menjalankan amanah dari UUD 1945, Pemerintah Daerah mempunyai tugas mendukung dan mensukseskan program Wajib Belajar yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenjang, satuan pendidikan dan meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat. Keberhasilan di bidang pendidikan tahun 2009 dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

Capaian APK dan APM dari tahun 2006 - 2009 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Target Nasional (%)	Realisasi 2006 (%)	Realisasi 2007 (%)	Realisasi 2008 (%)	Realisasi 2009 (%)
1	APK :					
	SD/MI	110	107.28	106.5	108.41	113.39
	SMP/MTs	90	101	98.86	99.48	100.69
	SM/SMA	90	73.26	76.60	77.22	76.55
2	APM :					
	SD/MI	95	91.13	92.70	97.06	96.10
	SMP/MTs	80	73	94.14	95.99	89.74

	SM/SMA	60	52.06	53.30	52.38	71.78
3	Tingkat Penyelesaian Sekolah :					
	SD/MI	90	100	100	100	100
	SMP/MTs	90	100	100	100	100
	SM/SMA	90	98	100	100	100
4	Tingkat Putus Sekolah					131,86

Tingkat Kelulusan siswa dalam UASBN

No	Jenjang Pendidikan	Target (%)	Realisasi 2006 (%)	Realisasi 2007 (%)	Realisasi 2008 (%)	Realisasi 2009 (%)
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	99.83	98.61	99.27
3	SM/SMA	100	96.03	97.03	98.59	99.56

Pencapaian sasaran tersebut di atas, secara fisik didukung oleh pencapaian :

- Penambahan dan rehabilitasi sarana/ prasarana yang rusak telah dilakukan secara bertahap. Jumlah gedung sekolah yang pada tahun 2009 sebanyak 139 unit sekolah tersebar di 4 Kecamatan dengan jumlah ruang kelas sebanyak 998 ruang dari jumlah tersebut ruang kelas yang direhab sebanyak 917 (93%) pada tahun 2009, dengandemikian masih 81 unit ruang kelas gedung SD tersebar di 4 Kecamatan yang memerlukan perbaiki/ peningkatan namun belum tertangani. Tahun 2010 mendatang diharapkan kondisi gedung sudah 100% dalam keadaan baik dan 5 (lima) tahun yang akan datang di programkan pembangunan perpustakaan sekolah bagi SD yang belum memiliki perpustakaan
- Jumlah penambahan koleksi bahan pustaka tahun 2009 sebanyak 1.667 buku untuk penambahan koleksi buku untuk perpustakaan sekolah baik jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah yang terdiri dari buku keagamaan, buku pengetahuan umum dan buku pengetahuan dan teknologi.

Sasaran Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan SD/MI, SMP, SMA/MA dan SMK

Untuk mencapai sasaran ini telah dirumuskan 1 program yaitu program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang dipakai untuk menentukan keberhasilan program ini adalah : Jumlah guru yang layak mengajar dan Ketersediaan tenaga kependidikan non guru. Berdasarkan realisasi target dari indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran ini dapat diwujudkan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 115,24%

Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa berusaha untuk mencerdaskan masyarakatnya. Dengan keterbatasan dana yang ada, disamping meningkatkan mutuan jumlah sarana dan prasarana pendidikan disetiap jenjang, juga meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Mendiknas Nomor 123/U/2001, yang menetapkan kualifikasi tertentu bagi para guru disetiap jenjang pendidikan. Jumlah guru disetiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Guru Berkualifikasi Min. D4/S1	Jumlah guru yang ditingkatkan kualifikasinya	Jumlah Guru yang telah Bersertifikasi
1	TK	90	17	125	38
2	SD/MI	1.289	462	210	237
3	SMP/MTs	596	578	91	178
4	SM/SMA	437	416	36	135

Rasio guru dan murid pada tahun 2009 pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio tahun 2009
1	SD/MI	1.289	19.083	14
2	SMP/MTs	596	8.404	14
3	SM/SMA	437	7.868	18

Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dilakukan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mematuhi aturan hukum yang mengarah pada kemajuan peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia. Berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang antara lain ditandai oleh semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan dalam rangka meningkatkan usaha penggalian, pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya. Pelaksanaan pembinaan dengan fokus lembaga-lembaga tradisional (desa adat, subak, sekaa kesenian) sangat strategis karena lembaga tradisional ini sangat potensial. Masyarakat Klungkung yang penduduknya mayoritas beragama Hindu, adalah pendukung utama kebudayaan Bali yang sangat unik dengan jati diri yang khas hasil rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal. Kondisi ini terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofis. Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Klungkung melakukan aktivitas adat dan budaya secara rutin yang dilandasi nilai-nilai agama Hindu dalam wadah desa adat/pakraman.

Pembangunan kebudayaan lintas sektoral dilaksanakan untuk membina interaksi dinamika yang positif antara kebudayaan dengan pembangunan sektor-sektor lain khususnya sektor prioritas yang menekankan pertumbuhan dan pemerataan dalam kerangka pelestarian nilai-nilai budaya daerah. Pembinaan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung dan pengembang kebudayaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran kebanggaan budaya, identitas budaya serta harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga terjadi keterkaitan fungsional antara pendidikan dengan kebudayaan. Pesta Kesenian Bali yang diselenggarakan

setiap tahun dimana tahun 2009 adalah pelaksanaan yang ke tiga puluh satu. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pengembangan kebudayaan Klungkung terutama pembangunan bidang kepariwisataan yang berjalan sangat cepat sejalan perkembangan teknologi komunikasi.

Keagamaan

Kehidupan beragama merupakan sektor pembangunan yang penting, karena dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29 yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Di samping itu, terbangunnya kerukunan umat beragama akan menjadi modal sosial bangsa untuk turut mendukung kemajuan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Sejumlah perkembangan penting di antaranya adalah meningkatnya kehidupan harmonis umat beragama yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial bernuansa keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan berkembangnya kerja sama lintas agama; meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penyuluhan keagamaan, pemerataan fasilitas keagamaan, serta berkembangnya pusat-pusat informasi keagamaan

Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat Bali sudah cukup tinggi, ditandai semaraknya pelaksanaan upacara –upacara keagamaan, namun kehidupan beragama belum sepenuhnya menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama. Kehidupan beragama masyarakat pada umumnya masih pada tataran simbol-imbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Begitu pula harmonisasi sosial, hubungan internal dan antar umat beragama yang aman, damai, saling menghargai perlu terus ditingkatkan.

Keamanan, ketentraman dan ketertiban

Keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah Bali sampai saat ini secara umum tergolong cukup kondusif, namun masyarakat belum sepenuhnya dapat menikmati rasa aman karena diberbagai tempat masih sering terjadi tindakan kriminal dan konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat. Terkendalnya masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban di Klungkung tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh potensi kekuatan cegah tangkal kejahatan yang ada di Kabupaten Klungkung, baik dari unsur aparat pemerintah (Polri, TNI, Pemda dengan perangkat-perangkatnya) maupun dari unsur petugas keamanan tradisional yaitu “pecalang” di masing-masing desa pakraman.

Politik

Dalam bidang politik masuknya berbagai kepentingan politik di daerah menyebabkan kerawanan Klungkung terhadap konflik, baik horisontal maupun vertikal. Semua ini akhirnya mengganggu stabilitas politik di daerah, hal tersebut antara lain dapat diketahui baik dari adanya konflik antar individu maupun antar kelompok pada berbagai tempat yang dipicu oleh kepentingan politik.

Hukum

Pembangunan bidang hukum belum optimal khususnya dalam penegakan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait dengan substansi hukum, kualitas SDM penegak hukum dan budaya taat hukum dalam masyarakat. Belum optimalnya penegakan hukum ini menyangkut antara lain bidang tata ruang dan lingkungan hidup, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) mencakup hak cipta maupun hak paten, tertib administrasi pertanahan khususnya pelaba pura yang belum keseluruhan dapat dilakukan pensertifikatannya dan konflik-konflik sosial termasuk didalamnya konflik adat yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Pemerintahan dan Aparatur

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, saat ini pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kondisi dan permasalahan serta tantangan yang berbeda dengan yang dihadapi dalam kurun waktu sebelumnya. Perkembangan zaman era globalisasi di lingkup nasional dan internasional yang dihadapi dewasa ini dan di masa mendatang mengisyaratkan perubahan paradigma kepemimpinan, pembaruan sistem kelembagaan, serta peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean government* dan *good governance*).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan (*shifting authority*) dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah pusat secara prinsip, bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pengelolaan perekonomian nasional. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) di daerahnya.

Salah satu indikator kesiapan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan andal. Saat ini kapasitas dan kinerja SDM aparatur pemerintah Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi ideal sesuai yang diharapkan.

b. Bidang Ekonomi

Kabupaten Klungkung tidak memiliki sumber daya alam pertambangan dan hutan yang dapat diolah, sehingga dalam pembangunan di bidang ekonomi bertumpu pada tiga sektor unggulan yaitu; sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri kecil dan menengah, serta sektor pariwisata.

Dalam pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Industri di Kabupaten Klungkung pengembangannya terbatas pada kegiatan industri kecil dan menengah, sebaliknya industri besar dan berat tidak dikembangkan, mengingat Kabupaten Klungkung merupakan daerah pariwisata sebagai bagian dari pariwisata Bali dan tidak memiliki sumberdaya mineral. Industri yang dikembangkan disini adalah industri yang berorientasi bahan baku pertanian lokal dan diarahkan untuk mendukung industri pariwisata.

Pembangunan sektor **pariwisata** dititikberatkan pada pemanfaatan potensi alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, obyek dan daya tarik wisata lainnya, dengan tetap mengedepankan kehidupan sosial budaya daerah.

c. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Penataan ruang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai. Rencana tata ruang merupakan acuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, namun dalam implementasinya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, sehingga kegiatan pembangunan berlandaskan tata ruang, belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keberadaan dokumen rencana tata ruang masih jauh dari harapan, terlebih-lebih rencana tata ruang yang sudah dituangkan ke dalam Perda masih sangat kurang untuk dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Bidang Lingkungan Hidup, secara umum kondisinya masih perlu mendapat penanganan secara lebih serius mengingat telah banyak mengalami penurunan kualitas. Hal ini dapat dilihat dari kondisi umum beberapa aspek lingkungan hidup sebagai berikut :

- ◆ Sumberdaya Hutan
- ◆ Keanekaragaman Hayati
- ◆ Pesisir dan Laut
- ◆ Sumber daya air
- ◆ Pencemaran Lingkungan.

d. Bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Klungkung dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah. Disadari bahwa belum seluruh kebutuhan infrastruktur mampu dipenuhi mengingat keterbatasan yang ada, namun akan tetap diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sampai saat ini kondisi secara umum dan kinerja pembangunan infrastruktur dapat digambarkan sebagai berikut.

Irigasi

Operasional dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi diarahkan untuk menjaga infrastruktur pengairan agar dapat berfungsi dengan baik dalam upaya memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dalam arti luas. Dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air bersih maupun untuk kepentingan lainnya. Untuk mencegah daya rusak air terhadap daerah pertanian, pariwisata, tempat-tempat kegiatan upacara keagamaan, serta fasilitas umum lainnya, pemerintah telah membangun pengamanan pantai dalam upaya menjaga kelestarian pantai yang ada.

Jalan dan Jembatan

Pembangunan sarana/prasarana fisik yang meliputi prasarana jalan dan jembatan merupakan pendukung peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pembangunan sarana/prasarana fisik perlu terus ditingkatkan dan tetap menyesuaikan pada kondisi serta kemampuan daerah dengan menitikberatkan pada pemeliharaan dan penyempurnaan. Untuk dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana fisik yang telah ada perlu dilakukan peningkatan dan pembangunan infrastruktur baru yang dilaksanakan secara lebih selektif berikut peningkatan peran investasi swasta serta dana pemerintah.

Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi selain sambungan rumah, juga diselenggarakan dengan menggunakan mobile phone atau telepon bergerak. Dewasa ini perkembangan penggunaan mobile phone amat pesat yang ditunjukkan dengan makin banyaknya penyelenggara/operator seluler yang beroperasi di wilayah Klungkung, baik yang menggunakan sistem *Global System Mobile (GSM)* maupun *Code Division Multiple Access (CDMA)*. Sarana fisik yang menonjol dari mobile phone ini adalah digunakannya tower/menara untuk memancarkan sinyal agar pelayanan mobile phone ini dapat melingkupi seluruh wilayah Klungkung dan Bali umumnya.

Air Bersih

Pelayanan air bersih terus diupayakan sampai kesetiap rumah tangga sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kemampuan debit air dengan memperhatikan sumber-sumber mata air yang ada.

Sampah dan Air Limbah

Pengelolaan limbah cair keluarga umumnya dilakukan dengan cara membuang pada septic-tank di masing-masing rumah, sedangkan untuk pembuangan limbah pada saat pengurusan di buang ketempat pembuangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada. Kapasitas IPLT masih sangat terbatas serta belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan limbah untuk tempat-tempat atau lokasi yang berpotensi limbah, sehingga setiap pembangunan tempat-tempat tertentu wajib dilengkapi dengan sarana pengelolaan limbah. Penanganan masalah sampah telah diupayakan dengan berbagai upaya, seperti :

- Penyiapan tempat-tempat sampah
- Pengangkutan sampah ke TPK secara rutin dan tepat waktu
- Pembinaan melalui program-program penyuluhan, lomba perindangan, kebersihan lingkungan, dll.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya.

Kegiatan yang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* minimal 100 %. Selama tahun 2009, kegiatan-kegiatan yang dikategorikan efektif adalah sebanyak 472 kegiatan.

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/ penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

Kegiatan yang Kurang/Tidak Efektif

Kegiatan dinyatakan kurang/tidak efektif apabila capaian rata-rata indikator *outcome/benefit/impact*-nya di bawah 100%. Selama tahun 2009 terdapat 31 kegiatan yang termasuk dalam katagori ini.

Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable*, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/ penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung, terutama dalam hal perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan waktu pelaksanaan kegiatan. Sebab lain adalah tidak dirumuskannya indikator outcome dengan tepat.

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja *outcome/benefit/impact* nya. Selama tahun 2009, tidak terdapat kegiatan yang termasuk di dalam katagori ini.

Efisiensi kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *masukan* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *keluaran* yang sama, atau *masukan*

yang sama dapat menghasilkan *keluaran* yang lebih besar, atau prosentase capaian kinerja *keluaran* lebih tinggi dari prosentase capaian kinerja *masukan*. Dengan demikian fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *masukan* dan *keluaran* dari suatu kegiatan. Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan **angka capaian efisiensi** (disingkat **ACE**) dengan **standar efisiensi yang dipakai** (disingkat **SED**). **ACE** diperoleh dengan membandingkan capaian *keluaran* dengan capaian *masukan*, sebagaimana rumus di bawah ini :

$$ACE = \frac{\% \text{ capaian keluaran}}{\% \text{ capaian masukan}}$$

Sedangkan **SED** merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa *angka capaian efisiensi tahun lalu*, *angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama*, atau *angka capaian efisiensi sesuai rencana capaian/target*, dan sebagainya. **SED** yang digunakan sebagai pembanding adalah *angka capaian efisiensi sesuai rencana capaian/target*, yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus:

$$\begin{aligned} SED (\text{angka capaian efisiensi sesuai} &= \frac{\% \text{ rencana capaian keluaran}}{\% \text{ rencana capaian masukan}} \\ \text{rencana capaian/target}) &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ACE kemudian dibandingkan dengan **SED** dan penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut:

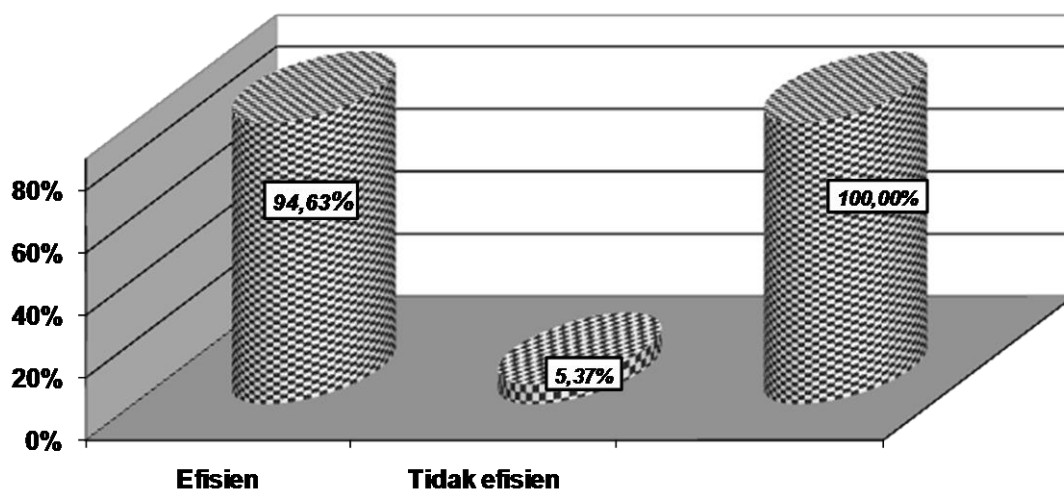
Jika ACE ≥ SED maka kegiatan dianggap efisien

Jika ACE < SED maka kegiatan dianggap tidak efisien

Selama tahun 2009, dari sejumlah 503 kegiatan strategis yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Klungkung, sebanyak 476 kegiatan (**94,63%**) dilaksanakan dengan efisien; dan sebanyak 27 kegiatan (**5,37%**) kegiatan tidak/kurang efisien, sebagaimana tergambar pada grafik berikut. Rincian lebih lanjut atas efisiensi masing-masing kegiatan disajikan pada Lampiran 1.

Penyebab ketidak-efisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Kelemahan dalam penetapan indikator output, yang terlalu tinggi
- Anggaran tersedia sesuai kebutuhan, dan realiasi biaya administrasi tetap dikeluarkan namun fisik kegiatan masih nihil.
- Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak efisien ini akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk kelangsungan kegiatan pada tahun berikutnya.

EFISIENSI KEGIATAN**2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak**

Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2009 namun masalah dan tantangan yang masih ada dan harus dipecahkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Bidang Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan kualitas penduduk seperti, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan

Permasalahan Pembangunan di Bidang Sosial Budaya :

Permasalahan Bidang Kependudukan :

1. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;
2. Pengangguran yang masih cukup tinggi
3. Jumlah rumah tangga miskin yang masih cukup tinggi;
4. Kualitas penduduk pada sektor profesional kerja masih belum optimal bersaing dengan tenaga kerja lain.

Permasalahan Bidang Pendidikan :

1. Belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya percepatan pencapaian standar minimal pendidikan pada setiap jenjang pendidikan
2. Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan aksesnya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas
3. Belum terpenuhinya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan pada setiap sekolah dan jenjang pendidikan
4. Belum optimalnya perhatian berbagai pihak dalam perumusan regulasi bidang pendidikan
5. Masih tingginya angka buta aksara
6. Belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya penurunan angka putus sekolah

Permasalahan Bidang Kesehatan :

1. Masih adanya disparitas mutu dan cakupan Yankes;

2. Masih rendahnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat;
3. Masih adanya pemasalahan gizi pada balita (gizi kurang dan gizi buruk);
4. Masih tingginya penyakit menular berbasis lingkungan dan penyakit tidak menular;
5. SDM kesehatan terutama kualitas, kuantitas dan distribusinya tidak merata.
6. Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan aksesnya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas

Permasalahan Bidang Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Makin meningkatnya penyandang masalah sosial seperti; kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, akibat bencana alam dan bencana sosial;
2. Penyalahgunaan napza dan penyimpangan prilaku yang membutuhkan penanganan secara konprehensif dan partisipatif.

Permasalahan Bidang Kebudayaan :

1. Cepatnya masyarakat menyerap budaya global yang negatif;
2. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola keragaman dan kekayaan budaya daerah;
3. Masih rendahnya penghargaan pada nilai budaya dan nilai solidaritas sosial;
4. Belum optimalnya harmonisasi sosial dan hubungan internal antar umat beragama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan saling menghargai.

Permasalahan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

1. Masih seringnya terjadi bencana sosial yang ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
2. Masih rendahnya kewaspadaan dalam pengawasan terhadap penduduk pendatang yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam Bidang Politik dan Hukum

1. Masih kurang terpeliharanya situasi dan kondisi politik yang kondusif dalam mencegah terjadinya instabilitas politik untuk menghindari terjadinya perpecahan/disintegrasi di masyarakat.
2. Masih rendahnya penegakan supremasi hukum secara konsekuen.

Permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

1. Masih rendahnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur sebagai unsur pertama atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat .

Tantangan yang dihadapi di bidang sosial budaya :

1. SDM yang belum memadai dan belum mampu bersaing baik nasional maupun internasional
2. Kurangnya kemampuan yang dimiliki untuk bersaing pada dunia kerja apalagi menghadapi pasar bebas pada tahun 2013, diprediksi pengangguran akan semakin bertambah
3. Kualitas pendidikan yang belum memadai, dimana sampai saat ini standar pendidikan masih banyak bersifat teoritis, belum bersifat aplikatif

4. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tidak dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat kaitannya dengan lingkungan internal akan berdampak besar terhadap kesehatan
5. Perkembangan jaman mengarah pada globalisasi yang penuh dengan dunia ICT (*Information, Communication and Technology*) akan berdampak terkikisnya nilai-nilai budaya
6. Agama sering dipakai sebagai alat untuk memecah belah antara kelompok masyarakat, seperti kasus Ambon, Poso, dll.
7. Peningkatan jumlah penduduk pendatang terjadi setiap tahun sedangkan lapangan kerja semakin berkurang. Hal ini menyebabkan terjadinya kemiskinan dari sisi ekonomi yang bermuara pada tindakan kriminalitas.
8. Politik adalah sebagai penentu dalam mengambil keputusan terhadap arah kebijakan pemerintah, tapi banyak orang atau kelompok memanfaatkannya sebagai komoditas kekuasaan.

Kondisi yang diharapkan di bidang sosial budaya pada Tahun 2011 :

1. Meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan penduduk
2. Menurunkan jumlah pengangguran
3. Menyediakan pendidikan yang berkualitas
4. Meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan
5. Meningkatkan penghargaan pada nilai budaya
6. Meningkatkan harmonisasi sosial dan hubungan inter dan antar umat beragama
7. Meningkatkan kewaspadaan dalam pengawasan terhadap penduduk pendatang yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
8. Meningkatkan situasi dan kondisi politik yang kondusif dan mencegah terjadinya instabilitas politik yang dapat menimbulkan perpecahan/ disintegrasi di masyarakat
9. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintahan daerah

Bidang Ekonomi

Permasalahan bidang ekonomi yang terkait dengan permasalahan masing-masing sektor, adalah sebagai berikut :

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor **Pertanian** dalam arti luas adalah :

1. Permasalahan sub sektor **Pertanian Tanaman Pangan**, meliputi ketersediaan air irigasi sangat kurang terutama saat musim kemarau. Rata-rata kepemilikan lahan sempit, kesuburan lahan menurun, sedangkan kebutuhan pangan yang semakin meningkat sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk serta tuntutan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif, minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian cenderung menurun, kualitas SDM dan tenaga kerja terbatas, sarana dan prasarana terbatas, permodalan dan penciptaan akses pasar lemah (persaingan produk), harga produksi pertanian cenderung rendah pada saat panen raya serta serangan OPT (*Organisme Pengganggu Tumbuhan*).
2. Permasalahan di sub sektor **Perkebunan** meliputi masih adanya serangan hama penyakit seperti penggerek buah, batang dan daun, penerapan sistem dan usaha agribisnis belum berkembang, produksi/produktivitas masing-masing komoditi masih berada di bawah kapasitas teknis, produksi perkebunan yang bermutu baik masih relatif kecil dan perkembangannya juga relatif lambat, fluktuasi harga produk yang tajam dan rantai pasar yang terlalu panjang, luas areal perkebunan

mengalami penurunan, kelembagaan kelompok tani masih lemah, terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan yang dimiliki oleh kelompok tani.

3. Permasalahan di sub sektor **Peternakan** antara lain masih berjangkitnya penyakit hewan menular, meningkatnya pemotongan ternak sapi betina produktif, rendahnya pendapatan petani peternak, lemahnya dukungan permodalan, rendahnya kualitas SDM peternak dan isu flu burung yang menyebabkan menurunnya harga ternak terutama unggas serta isu rabies yang berpengaruh pada sektor pariwisata.
4. Permasalahan sub sektor **Perikanan dan Kelautan**, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, masih lemahnya kemampuan SDM terutama SDM nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah ikan dalam menerapkan iptek bidang perikanan dan kelautan, masih adanya penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan (*Destructive Fishing*), serta masih rendahnya mutu produk dan daya saing hasil perikanan, belum adanya rencana umum tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor **Industri Kecil dan Menengah** di Kabupaten Klungkung, adalah :

1. Terbatasnya bahan baku lokal, sehingga didatangkan dari daerah lain.
2. Lemahnya daya saing mutu produk komoditi ekspor daerah Bali sehingga belum mampu bersaing di pasar internasional.
3. Kebutuhan modal kerja semakin besar akibat peningkatan biaya produksi.
4. Belum terdaftarnya hasil produk/desain dalam HAKI dan merk.
5. Kualitas SDM masih rendah.
6. Kurangnya informasi pasar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan **UKM dan Koperasi**, adalah :

1. Masih rendahnya daya saing ekspor produk UKM dan Koperasi,
2. Masih rendahnya kualitas SDM dalam bidang kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreatifitas serta profesionalisme dalam pengelolaan usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
3. Masih rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen, yakni kemampuan UMKM dan koperasi yang berkembang saat ini belum cukup merata pada seluruh UMKM dan Koperasi
4. Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan BUMN/BUMD maupun perusahaan besar.
5. Terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis bagi pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta masih rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi.
6. Masih rendahnya kemampuan koperasi dan UKM dalam mengakses pasar dan penguasaan teknologi informasi dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang berubah sangat cepat.
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan institusi swasta dan dunia usaha dalam pemberdayaan usaha kecil.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor **Pariwisata** adalah:

1. Masih rendahnya daya saing industri pariwisata nasional.

2. Belum optimalnya sinergi pembangunan pariwisata dengan pembangunan sosial dan budaya.
3. Persaingan yang semakin ketat antara negara-negara tujuan wisata.
4. Belum mantapnya keamanan dan kenyamanan pada daerah tujuan wisata.
5. Belum meratanya penyebaran sarana dan prasarana pariwisata yang memadai.
6. Rendahnya daya saing SDM pariwisata.
7. Belum efektifnya promosi pariwisata, baik dalam maupun luar negeri .

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan **Investasi** antara lain:

1. Investasi yang ada tidak merata di seluruh Kab/Kota.
2. Penyebaran PMA dan PMDN di Kabupaten Klungkung belum menunjukkan realisasi yang nyata
3. Investor cenderung lebih berminat untuk berinvestasi di wilayah perkotaan, namun lahan terbatas dan mahal.
4. Sarana dan Prasarana di luar kawasan perkotaan masih sangat terbatas.
5. Promosi investasi belum terpadu.
6. Pelayanan perijinan belum optimal dan persyaratan administrasi yang diajukan oleh investor sering kurang lengkap.
7. Kesulitan untuk memantau perkembangan perusahaan karena investor tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya.
8. Investor kurang disiplin dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan **Ekspor non migas** adalah :

1. Persaingan global semakin ketat.
2. Belum semua IKM/UKM menguasai teknologi informasi sehingga kurang cepat mengakses pasar internasional
3. Masih adanya keterbatasan modal dan pengelolaan perusahaan masih sederhana.
4. Masih lemahnya perlindungan HAKI
5. Infrastruktur belum memadai terutama pelabuhan laut dan tempat promosi yang bertaraf internasional.
6. Daya saing beberapa produk masih rendah

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian daerah :

1. Perekonomian Kabupaten Klungkung masih rentan terhadap berbagai gejala terutama akibat krisis global yang belum menunjukkan gejala pemulihan.
2. Perkembangan industri kepariwisataan tidak terlepas dan masih terkait langsung dengan aktivitas dua sektor unggulan berikutnya yaitu sektor pertanian serta sektor industri kecil dan rumah tangga.
3. Perkembangan sektor pertanian dan sektor industri sangat tergantung pada perkembangan industri pariwisata, mengingat peluang pemasaran produknya sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Bali.

Tantangan dibidang perekonomian tahun 2011 adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui :

1. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
2. Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis

3. Meningkatkan investasi
4. Meningkatkan daya saing produk ekspor
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan

Kondisi yang diharapkan di bidang ekonomi pada Tahun 2011 :

- a. Terpenuhinya kebutuhan akan pangan yang cukup pada tingkat rumah tangga dalam upaya mendukung ketahanan pangan
- b. Meningkatnya kualitas SDM, baik petugas, petani dan pelaku pembangunan pertanian
- c. Terciptanya teknologi yang tepat guna (terapan) spesifik lokasi dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu
- d. Terciptanya usaha jasa yang bergerak di sektor pertanian sehingga bisa menarik minat generasi muda untuk mau terjun di bidang pertanian
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan produksi pertanian
- f. Pemberdayaan sektor kelautan lebih optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir
- g. Meningkatnya pemahaman sektor industri formal dan informal tentang desain, kemasan, inovasi, mutu dan pemasaran sehingga produk komoditi ekspor mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional melalui pameran-pameran di tingkat daerah dan nasional.
- h. Pemerataan pertumbuhan koperasi secara kuantitatif diberbagai sektor sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya anggota koperasi
- i. Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat

Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang penataan ruang dan lingkungan hidup adalah :

1. Dokumen rencana tata ruang sebagian besar belum mempunyai kekuatan hukum.
2. Rencana tata ruang belum sepenuhnya dipahami sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta oleh pelaku pembangunan dalam melaksanakan program pembangunan.
3. Kualitas dan kuantitas terumbu karang menurun akibat faktor alam dan aktivitas manusia
4. Degradasi hutan mangrove akibat perambahan, pembuangan sampah plastik dan logam.
5. Abrasi pantai

Tantangan yang dihadapi dalam bidang penataan ruang dan lingkungan hidup adalah:

1. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah
2. Menyelaraskan penataan ruang dengan pesatnya tuntutan pembangunan sektor ekonomi.
3. Menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup.

Kondisi yang diharapkan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup pada Tahun 2011 :

1. Adanya kepastian hukum masyarakat dan investor dalam pemanfaatan tata ruang

2. Terkendalinya pemanfaatan ruang secara bijaksana, serasi dan terpadu pada semua sektor
3. Terpeliharanya ruang terbuka hijau baik pada daerah perkotaan ataupun transisi antara perkotaan dan pedesaan
4. Terwujudnya pembangunan yang selalu memperhatikan lingkungan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana

Bidang Infrastruktur

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang infrastruktur, sebagai berikut:

Permasalahan Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan yang sangat pesat hingga mencapai 12% per tahun, sedangkan pembangunan jalan baru hanya \pm 1% per tahun.
2. Kemampuan jalan masih terbatas, untuk di beberapa ruas jalan masih dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.
3. Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan di sekitar atau sepanjang jalan tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.

Permasalahan Angkutan Penyebrangan

1. Pembangunan infrastruktur pelabuhan penyebrangan/dermaga sandingan di Gunaksa (Klungkung Daratan) belum terealisasi sampai dengan pertengahan tahun 2010 ini.
2. Terjadinya antrian kendaraan pada hari-hari tertentu pada pelabuhan penyebrangan
3. Terbatasnya fasilitas baik sarana maupun prasarana penyeberangan laut sehingga pada saat-saat tertentu terjadi antrian yang panjang

Permasalahan Telekomunikasi

1. Masih rendahnya kemampuan SDM aparaturnya pemerintah dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI)
2. Keberadaan jumlah menara telekomunikasi (tower) yang ada di Klungkung sudah melebihi kebutuhan sehingga sangat mengganggu keserasian dan keamanan lingkungan.

Permasalahan Air Bersih

1. Target pelayanan air bersih baik di perkotaan dan pedesaan belum terpenuhi, mengingat kesulitan biaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku.
2. Belum optimalnya pelibatan swasta dalam pengelolaan dan pelayanan air bersih.

Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Air Limbah

1. Kapasitas tampung TPA sangat terbatas, pembebasan lahan untuk TPA makin sulit, pengelolaan sampah dengan metoda *sanitary-landfill* tidak terlaksana dengan baik.
2. Pengelolaan limbah rumah tangga untuk memenuhi perkembangan penduduk dan pembangunan yang pesat sangat terbatas, mengingat pembuangan limbah secara terpusat berupa sewerage/lagoon belum memadai.

Tantangan dalam pembangunan bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Tantangan dalam pembangunan Sumber Daya Air :

-
- Pengelolaan sumber-sumber air baku bagi terpenuhinya kebutuhan air bersih dan irigasi secara berimbang
 - Menyeimbangkan pemanfaatan air terutama antara pertanian dan kepentingan pariwisata
2. Tantangan dalam bidang jalan dan jembatan :
- Menjaga jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik, agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan rasa aman serta keselamatan bagi masyarakat penggunaannya.
 - Rasio perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor semakin tidak berimbang karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor jauh lebih cepat dibanding laju pertumbuhan panjang jalan.
3. Tantangan dalam bidang Angkutan Penyeberangan :
- Masih terjadinya antrean yang panjang pada saat-saat tertentu, misalnya liburan dan hari raya
 - Kondisi cuaca yang sering tidak kondusif dan kondisi moda angkutan penyeberangan yang rata-rata sudah berumur mengakibatkan gangguan jadwal penyeberangan.
4. Tantangan dalam bidang Telekomunikasi :
- Teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan kebutuhan mendasar pada saat ini, sehingga cakupan pelayanan dan ketersediaan infrastruktur pendukungnya harus semakin ditingkatkan.
 - Pembangunan infrastruktur pendukung terutama menara telekomunikasi harus diawasi dengan baik untuk menghindari jumlah pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali.
5. Tantangan di bidang Air Bersih :
- Jumlah kebutuhan konsumsi air bersih semakin meningkat baik di perkotaan maupun perdesaan, namun ketersediaan sumber dan kemampuan kapasitas produksi sudah semakin terbatas.
 - Air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga cakupan pelayanan untuk perkotaan dan perdesaan harus semakin ditingkatkan
6. Tantangan Pengelolaan Sampah dan Air Limbah :
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan air limbah dalam menjaga sanitasi lingkungannya.
 - Membantu mempercepat proses pengelolaan sampah dengan mendidik masyarakat untuk ikut mengelola sampah mulai dari sumbernya, dengan menerapkan pola pemisahan sampah baik organik maupun an organik.

Kondisi yang diharapkan di bidang infrastruktur pada Tahun 2011 :

- a. Terwujudnya dermaga sandingan di Desa Gunaksa Klungkung dalam rangka memperlancar arus transportasi dari dan ke Nusa Penida
 - b. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang belum memperoleh distribusi air dan meningkatnya kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat
 - c. Pemahaman dan aplikasi teknologi dan informasi bagi masyarakat dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya
-

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2009, perkiraan tahun 2010, sasaran sasaran pokok tahun 2011, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2011 tersebut akan dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2009 Dan Perkiraan Tahun 2010

Secara garis besar, kondisi ekonomi makro tahun 2009 dan perkiraannya di tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Pertama, setelah terimbas krisis global pada akhir tahun 2008, pertumbuhan ekonomi sejak akhir tahun 2009 mulai mengalami pemulihan. Pemulihan ekonomi ini merupakan refleksi dari pulihnya perekonomian domestik dan lingkungan global. Dari sisi pengeluaran, pulihnya perekonomian domestik sejak triwulan IV 2009 ditunjukkan dengan tumbuhnya konsumsi swasta dan pemerintah, dan mulai membaiknya investasi dan menguatnya ekspor. Dari sisi penawaran, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi.

Kedua, ketahanan pasar uang dalam negeri relatif terjaga. Setelah mengalami guncangan pada akhir tahun 2008, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Jakarta secara bertahap mulai pulih. Demikian pula dengan nilai tukar rupiah yang terus menguat hingga pertengahan April 2010, didorong oleh pulihnya ekspor dan meningkatnya aliran modal masuk setelah mengalami aliran modal keluar sejak krisis global akhir 2008.

Ketiga, stabilitas ekonomi membaik. Sebagai dampak dari menurunnya harga komoditas dunia dan kebijakan pengendalian inflasi bahan pangan pokok dan barang dan jasa yang dikendalikan pemerintah dan kebijakan moneter yang berhati-hati, inflasi pada tahun 2009 menurun tajam. Inflasi pada tahun 2009 turun menjadi 2,78 dibanding 11,06 persen pada tahun 2008. Namun demikian pada Februari 2010 inflasi sedikit menaik menjadi 3,95 persen sejalan dengan kenaikan harga gabah pembelian pemerintah (HPP).

Dalam tahun 2009, perekonomian tumbuh 4,5 persen melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,0 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang masing-masing tumbuh 15,7 persen dan 4,9 persen. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 3,3 persen, ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa masing-masing tumbuh negatif sebesar 9,7 persen dan 15,0 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 4,4 persen serta sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi; listrik, gas dan air bersih; serta bangunan yang masing-masing tumbuh sebesar 15,5 persen; 13,8 persen, dan 7,1 persen. Adapun sektor pertanian dan sektor pengolahan non-migas masing-masing tumbuh 4,1 persen dan 2,5 persen .

Dengan ditingkatkannya koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terutama dalam mengatur permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai 5,5 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor diharapkan tetap menjadi penggerak utama perekonomian dengan didorong oleh konsumsi masyarakat. Sedangkan dari sisi produksi, industri pengolahan non-migas diharapkan mampu tumbuh tinggi seiring dengan perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor non-migas. Meskipun

demikian pertumbuhan ekonomi 5,5 persen di tahun 2010 perlu mencermati *downside risk* pada perkembangan ekonomi global berupa antara lain (i) hutang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal (ii) tingkat pengangguran yang masih tinggi pada beberapa negara maju (iii) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia.

Dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut, dan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 8,39 persen pada tahun Agustus 2008 menjadi 7,87 persen Agustus 2009 dan tingkat kemiskinan menurun dari 15,4 persen di tahun 2008 menjadi 14,1 persen pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi Klungkung tahun 2009 sebesar 5,07 sedikit lebih rendah dari yang capaian pada tahun 2008 sebesar 5,54. Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh faktor :

- a. Melonjaknya harga-harga komoditas baik makanan maupun non makanan sehingga mendorong perlambatan produksi sektor ekonomi.
- b. Melemahnya pertumbuhan sektor pertanian sebagai akibat pengaruh faktor musim.
- c. Krisis global finansial.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp.1.837.631,14 sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 2.143.792,34, Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga komoditas ekonomi meskipun jumlah produksi menurun namun secara total nilainya mengalami kenaikan. PDRB per kapita yang merupakan pendekatan dari tingkat kesejahteraan pada tahun 2009 sebesar Rp 12.821.877,89/tahun. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 yang mencapai Rp 11.050.495,75/tahun.

Struktur ekonomi Klungkung jika dikaitkan dengan target kontribusi sektor yang ditetapkan mengalami penyimpangan, dimana capaian kontribusi sektor adalah 45,07% untuk sektor tersier dari target 42,77%, diikuti sektor primer sebesar 36,55% dari target 39,08%, sedangkan komposisi sektor sekunder sebesar 18,37% melebihi dari target 18,16%. Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Klungkung, diupayakan peranan sektor primer dan sekunder lebih ditingkatkan untuk memperkuat daya handal perekonomian daerah. Strategi ini perlu dimantapkan dalam upaya menjaga pertumbuhan industri pariwisata yang rentan terhadap dampak berbagai isu baik lokal, regional dan internasional.

Tingkat inflasi di Bali umumnya pada tahun 2009 mencapai 9,62% jauh lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar $5 \pm 1\%$. Angka ini lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2008 sebesar 5,91%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: bergejolaknya harga pangan dunia seperti susu dan kedelai, berfluktuasi harga minyak dunia sehingga mendorong kenaikan BBM di dalam negeri dan masih lemahnya kontrol distribusi barang yang keluar-masuk daerah Bali terutama barang-barang bahan makanan seperti ikan, sayuran, kacang-kacangan, buah-buah dan lemak, sebagai akibat belum tersedianya database yang memadai untuk memantau peredaran barang-barang yang mudah bergejolak "*volatile food*".

Perekonomian Klungkung tahun 2010 akan semakin berat, hal ini disebabkan adanya gejolak krisis finansial global yang menyebabkan beberapa asumsi makro ekonomi tahun 2010 sulit terpenuhi.

Proyeksi Makro Ekonomi Tahun 2011

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi yang telah ditetapkan dan berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka proyeksi makro ekonomi tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Klungkung pada tahun 2010 ditetapkan pada kisaran 5,15–6,15%. Untuk mencapai angka tersebut maka peranan investasi dan ekspor perlu ditingkatkan, dan tidak terlalu didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Klungkung tahun 2011 ditetapkan pada kisaran Rp. 2.480.412,94. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil.

Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Klungkung masih sangat bertumpu pada sektor tersier dengan kontribusi sebesar 42,77%, sektor primer memberikan kontribusi 39,08% dan sektor sekunder sebesar 18,16%.

Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi perlu dikendalikan pada kisaran 5 ± 1 % khususnya terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Investasi

Jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi cukup besar dan Kabupaten Klungkung masih menggantungkan investasi pemerintah karena pada dasarnya investasi swasta dan rumah tangga sangat kurang.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 2011 jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara ditargetkan 130.00 orang dengan asumsi bahwa tingkat keamanan yang semakin kondusif serta komitmen pemerintah dan masyarakat Bali umumnya dan Klungkung khususnya yang tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 71,74 sebagaimana yang dicantumkan oleh Provinsi Bali, dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Klungkung akan sama dengan Provinsi Bali pada Tahun 2011 nanti.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan 2012**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Kabupaten Klungkung Tahun 2011 dan 2012**

Kondisi perekonomian Klungkung tahun 2011 dan 2012 diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Perkembangan industri pariwisata.
- c. Jumlah nilai produksi dan ekspor.
- d. Peranan sektor primer dan sekunder.
- e. Investasi baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat.
- f. Perkembangan ekonomi global.

Tantangan Pokok

Adapun tantangan pokok yang dihadapi Kabupaten Klungkung pada tahun 2011 dan 2012 adalah :

a. Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Klungkung masih cukup tinggi, pada tahun 2009 mencapai 27.382 RTM (15,61%). Tahun 2010 ditargetkan menurun sebesar 20.382 RTM . Masih tingginya RTM disebabkan antara lain ; faktor geografis, kultural, dan struktural.

b. Masih tingginya jumlah pengangguran

Jumlah pengangguran pada tahun 2008 mencapai 7.165 orang (4%) diperkirakan menurun pada tahun 2009 sebagai akibat dari semakin membaiknya perkembangan perekonomian daerah. Upaya penurunan angka pengangguran akan terkait dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun adanya krisis finansial ini sedikit banyak mempengaruhi upaya dalam penurunan angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan menjadi beban bagi pemerintah dan berdampak kurang baik bagi kehidupan sosial masyarakat.

c. Pertumbuhan ekonomi fluktuatif

Dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 %, menjadi 5,03% pada tahun 2007 dan tahun 2008 menjadi 5,54%, dan dengan adanya krisis finansial global maka pertumbuhan ekonomi Klungkung tahun 2010 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dihadapkan pada kendala-kendala terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai program-program yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan pengangguran.

d. Terbatasnya Sumber Daya

Pembangunan yang dilaksanakan memerlukan sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta sumber pendanaan. Kabupaten Klungkung tidak memiliki sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam pengembangan industri kecil dan kerajinan sehingga mendatangkan dari luar daerah. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, maka dibutuhkan pembiayaan dari sumber-sumber lainnya untuk melaksanakan program-program yang diperlukan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Klungkung tahun 2011 diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dan pendidikan serta bebas biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Disamping itu diupayakan pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan peranan sektor – sektor unggulan daerah dalam penyediaan kesempatan kerja.

Peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan regulasi di bidang perijinan dan adanya kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan infrastruktur, guna memacu pertumbuhan ekspor bagi produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasar regional, nasional dan internasional.

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.4.1 Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

3.4.2 Dana Desentralisasi/APBD

Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

1. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi :
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Sedangkan pendapatan transfer, meliputi :
 - a. Dana perimbangan, yang terdiri dari :
 - a.1. Dana Bagi Hasil Pajak
 - a.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam)
 - a.3. Dana Alokasi Umum
 - a.4. Dana Alokasi Khusus
 - b. Transfer Pemerintah Pusat lainnya, terdiri dari :
 - b.1. Dana Otonomi Khusus
 - b.2. Dana Penyesuaian
3. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat
 - c. Pendapatan lainnya.

Sedangkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011 sebagaimana tabel terlampir.

3.4.3 Dana Tugas Pembantuan/APBN

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

Dana Tugas Pembantuan (TP) untuk Kabupaten Klungkung pada tahun 2010 sebesar Rp. 6.844.635.000,00 mengalami peningkatan sekitar 35,08% (sebesar Rp. 1.777.510.000,00) dibandingkan dengan alokasi dana Tugas Pembantuan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 5.067.125.000,00

Pada tahun 2010 alokasi Dana Tugas Pembantuan diterima oleh beberapa satuan kerja, yaitu :

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar Rp. 1.032.500.000,00.
2. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 1.142.220.000,00
3. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp. 350.000.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 2.180.000.000,00
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.139.915.000,00

Kebijakan di bidang keuangan daerah pada dasarnya menjadi acuan/ kerangka dalam pengelolaan APBD, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Perda Provinsi Bali), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Pembiayaan;

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan Daerah, meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula Dana Alokasi Umum. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

Selain dana dari pendapatan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Klungkung. Sedangkan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klungkung yang memberikan kontribusi dalam pembangunan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut **fungsi** yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut **organisasi** disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja menurut **kelompok** belanja, terdiri atas :

- 1) Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

c. Pembiayaan

- 1) Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan, yang meliputi Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal daerah, Pembayaran utang pokok, Pemberian pinjaman daerah.
- 3) Pembiayaan neto, merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai, Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana”

Yang dimaksud dengan Masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai, Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masyarakat Klungkung yang sejahtera, yaitu menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin.
2. Masyarakat Klungkung yang Aman, yaitu masyarakat Klungkung yang teratur secara sekala niskala serta terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana. Seperti : terorisme dan anarkhisme.
3. Masyarakat Klungkung yang Damai, yaitu masyarakat Klungkung yang diselimuti atmosfer kesejukan lahir dan batin, baik di desa maupun perkotaan yang ditunjukkan dengan suasana bryag-briyug, pekedek pekenyem. Hal ini merupakan indikator optimisme masyarakat menatap masa depan.
4. Masyarakat Klungkung yang Bermartabat, yaitu masyarakat Klungkung yang disegani dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Masyarakat Klungkung yang bermoral, yaitu masyarakat Klungkung yang dalam berpikir, bertutur-kata, dan bertingkah laku yang sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari.
6. Masyarakat klungkung yang Berbudaya, yaitu masyarakat Klungkung yang mampu secara konsisten mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah dan Nasional, serta secara cerdas berkekrativitas dan berinovasi serta mengadopsi nilai-nilai positif budaya baru, yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini srategi yang dimaksud berupa kebijakan program dan kegiatan.

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan, maka visi dan misi pembangunan pada Tahun 2011 dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

Prioritas 1 : **Peningkatan aksesibilitas, pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan**

Prioritas 2 : **Peningkatan infrastruktur**

Prioritas 3 : **Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan penyakit menular : demam berdarah, flu burung, malaria, rabies dan muntaber**

-
- Prioritas 4 :** Penanggulangan kemiskinan
- Prioritas 5 :** Pemberdayaan perekonomian wilayah dan ekonomi kerakyatan
- Prioritas 6 :** Peningkatan kesempatan kerja (membuka peluang investasi dan pengembangan dunia usaha)
- Prioritas 7 :** Pemberdayaan dan pengembangan pariwisata, pelestarian kebudayaan daerah
- Prioritas 8 :** Peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dan HAM
- Prioritas 9 :** Peningkatan kualitas aparatur, pelayanan publik dan IPTEK
- Prioritas 10:** Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, dan industri kecil yang sinergis.

4.1.2 Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Prioritas 1 :

1. Tuntas rintisan wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru.
2. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representative.

Sasaran Prioritas 2 :

1. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif.
2. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergis keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.
4. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Sasaran Prioritas 3 :

1. Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 2. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan berbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat
 3. Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat.
-

-
4. Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat.

Sasaran Prioritas 4 :

1. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial.
2. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan
3. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Sasaran Prioritas 5 :

1. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
2. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi
3. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah
4. Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
5. Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian
6. Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
7. Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
8. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Sasaran Prioritas 6 :

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan
2. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi
3. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
4. Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
5. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

Sasaran Prioritas 7 :

1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama
3. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali
4. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama
5. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali

Sasaran Prioritas 8 :

1. Terwujudnya kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman yang kondusif dalam mendukung pembangunan
 2. Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
 4. Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah; dan
-

5. Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM

Sasaran Prioritas 9 :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
5. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
6. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Sasaran Prioritas 10 :

1. Terwujudnya swasembada pangan
2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam arti luas
3. Tumbuhnya industri kecil dan industri rumah tangga serta mampu bertahan dari krisis ekonomi

4.2 Prioritas Program dan Fokus Kegiatan Pembangunan

Prioritas program dan fokus kegiatan pembangunan yang ditetapkan merupakan penjabaran dari kesepuluh prioritas pembangunan daerah.

Prioritas 1 :

Peningkatan aksesibilitas, pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 1, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini:
 - Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
 - Pengadaan mebeleur sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
 - Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
 - Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
-

-
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
 - Penyediaan Bea Siswa Retrivel Untuk Anak Putus Sekolah
 - Penyediaan Bea Siswa Transisi
 - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Program Pendidikan Menengah
- Pembangunan Gedung Sekolah
 - Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa.
 - Pengadaan mebeleur sekolah
 - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 - Pengembangan Alternatif Layanan Pendidikan Menengah untuk Daerah-daerah Pedesaan, Terpencil dan Kepulauan.
 - Penyebarluasan dan Sosialisasi Bebagai Informasi Pendidikan Menengah
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Program Pendidikan Non Formal
- Pemberian Operasional Pendidikan Non Formal
 - Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
 - Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
 - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
 - Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
 - Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
 - Penyelenggaraan porseni, seleksi calon paskibraka, olahraga usia dini, pemilihan pemuda pelopor haornas
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk membenahi standar Kualifikasi
 - Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.
 - Pengembangan sistem perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kerja Pendidikan
 - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
 - Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Pengembangan Minat dan Budaya Baca
 - Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
-

Prioritas 2 :**Peningkatan infrastruktur**

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 2, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Perencanaan pembangunan jalan
 - Pembangunan jalan
 - Perencanaan pembangunan jembatan
 - Pembangunan jembatan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 3. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - Pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 6. Program Pembangunan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana air Limbah
 7. Program pengendalian banjir
 - Pembangunan prasarana pengaman pantai
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 8. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - Pembangunan/peningkatan infrastruktur
 9. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Penataan areal parkir
 11. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
-

- Mengadakan operasional pengendalian, pengamanan dan penertiban pengguna areal parkir

Prioritas 3 :**Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan penyakit menular : demam berdarah, flu burung, malaria, rabies dan muntaber**

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 3, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan sumber daya aparatur
 - Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Program upaya kesehatan masyarakat
 - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
 - Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
 - Monitoring dan evaluasi
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
 - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program perbaikan gizi masyarakat
 - Pemberian tambahan makanan dan vitamin
 - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi mikro lainnya
 - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Program pengembangan lingkungan sehat
 - Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
 - Sosialisasi Kenijakan Lingkungan Sehat
7. Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular
 - Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
 - Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
 - Pelayanan pencegahan dan penganggulangan penyakit menular
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
 - Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
 - Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-
9. Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - Pembangunan Puskesmas Pembantu
 - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
 - Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana puskesmas pembantu
 - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
 11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - Pelayanan pemeliharaan kesehatan
 13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
 - Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan, obat-obatan kerjasama dengan BPOM *)

Prioritas 4 :**Penanggulangan kemiskinan**

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 4, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
 - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
2. program transmigrasi regional
 - penyuluhan transmigrasi regional

Prioritas 5 :**Pemberdayaan perekonomian wilayah dan ekonomi kerakyatan**

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 5, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif
 - Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah.
 - Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.
 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
-

-
- Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
 - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
 - Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan ekonomi lokal
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Koordinasi pelaksanaan Kebijakan dan Program pembangunan Koperasi
 - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
 7. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Klaster Industri
 - Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

Prioritas 6 :

Peningkatan kesempatan kerja (membuka peluang investasi dan pengembangan dunia usaha)

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 6, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja.
2. Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 - Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Prioritas 7 :

Pemberdayaan dan pengembangan pariwisata, pelestarian kebudayaan daerah

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 7, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Nilai Budaya
 - Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 - penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
-

2. Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal.
3. Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
 - Monitoring, Eavlusi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman budaya
4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
 - Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Prioritas 8 :

Peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dan HAM

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 8, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penataan Peraturan Perundang – undangan
 - Koordinasi kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan
 - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan
 - Publikasi Peraturan Perundang – undangan
 - Kajian Peraturan Perundang - undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang - undangan daerah
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal
 - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Prioritas 9 :

Peningkatan kualitas aparatur, pelayanan publik dan IPTEK

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 9, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS
 - Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

-
- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
 - Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
 - Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
3. Program Pengembangan Data/Informasi
 - Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Penelitian)
 4. Program Pelayan Perijinan
 - Pelayanan perijinan
 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
 - Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
 - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
 - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Prioritas 10 :

Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, dan industri kecil yang sinergis.

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 10, maka prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
4. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan
5. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
6. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Penjabaran lebih lanjut program prioritas dan fokus kegiatan dari prioritas pembangunan 1 sampai dengan 10, sebagaimana termuat dalam tabel Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011, terlampir.

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2011 maka seluruh SKPD hendaknya merencanakan dan melaksanakan program sesuai arah kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, akuntabel, serta partisipatif. Disamping itu dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar bidang dan antar wilayah perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih yang pada akhirnya mengurangi manfaat dari keberhasilan pembangunan. Agar dapat mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi tersebut maka hasil-hasil forum SKPD dan Musrenbang dijadikan acuan utama di dalam penyusunan RKPD.

Dokumen RKPD ini, merupakan acuan bagi SKPD Kabupaten Klungkung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011. Kepada dunia usaha dan masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan dan memberikan kontribusi untuk dapat mewujudkan sasaran dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

RKPD merupakan acuan bagi seluruh SKPD di dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan bagi masyarakat maupun dunia usaha diharapkan dapat menyesuaikan dan memberikan kontribusi, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2011, maka disusun rencana kerja dan pendanaan menurut **urusan wajib dan urusan pilihan** yang dirinci ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan, SKPD yang bertanggung jawab, program, serta pagu indikatif per program pembangunan, khususnya yang dialokasikan untuk **Belanja Langsung**.

Program-program serta alokasi pembiayaan berdasarkan pagu indikatif disajikan dalam format sebagaimana tabel terlampir.

Untuk **Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan** yang menyentuh kepentingan masyarakat dialokasikan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, namun usulan program dan penganggarnya dilakukan oleh SKPD *leading sector* yang membidangi. SKPD-SKPD *leading sector* yang membidangi belanja tidak langsung tersebut antara lain :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
8. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12. Sekretariat DPRD
13. Inspektorat Daerah
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

15. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat
17. Badan Kepegawaian Daerah
18. Rumah Sakit Umum Daerah
19. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
20. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
21. Kantor Penanaman Modal
22. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
23. Kantor Lingkungan Hidup
24. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
25. Bagian Umum
26. Bagian Kesejahteraan Rakyat
27. Bagian Pembangunan
28. Bagian Perekonomian
29. Bagian Pemerintahan
30. Bagian Hukum, Organisasi dan HAM
31. Bagian Humas dan Protokol
32. Bagian Perlengkapan
33. Kecamatan Dawan
34. Kecamatan Klungkung
35. Kecamatan Banjarangkan
36. Kecamatan Nusa Penida
37. Kelurahan Semarapura Tengah
38. Kelurahan Semarapura Kaja
39. Kelurahan Semarapura Kangin
40. Kelurahan Semarapura Kelod Kangin
41. Kelurahan Semarapura Kelod
42. Kelurahan Semarapura Kauh

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013. Pelaksanaan program pembangunan seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk juga DPRD Kabupaten Klungkung.

Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan, yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA